

# RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2026

IMB

**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDA ACEH**

COUNTER  
**08**

COUNTER  
**09**

COUNTER  
**10**

2026

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga kami telah dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh Tahun 2026. Salawat dan salam kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2026 adalah program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirancang sebagai panduan untuk rencana kinerja DPMPTSP Kota Banda Aceh.

Kami menyadari bahwa Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 ini belum sepenuhnya sempurna, namun kami terus berupaya memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa depan. Kami sampaikan hal ini dengan harapan agar Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Banda Aceh, Januari 2026  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh



**FAISAL M, S.STP**  
NIP. 19780101 199810 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Struktur Organisasi.....	2
C. Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	3
<b>BAB II PERENCANAAN STRATEGI</b> .....	<b>4</b>
A. Sasaran Strategis.....	4
B. Tujuan dan Sasaran .....	4
<b>BAB III PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN</b> .....	<b>6</b>
A. Rencana Program Kegiatan.....	6
B. Kinerja Pelayanan.....	10
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>14</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Tahun 2025-2029.....	5
Tabel 3. 1 Rencana Kerja, Pendanaan, dan Kelompok Sasaran Tahun 2026.....	8
Tabel 3. 2 Daftar Jenis Layanan MPP Kota Banda Aceh Tahun 2026 .....	10

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah penjabaran dari tujuan dan program yang telah ditentukan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam RKT ditentukan rencana capaian kinerja tahunan, sasaran, serta seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT mencakup penetapan sasaran/uraian, indikator, dan target yang ingin dicapai pada tahun tersebut, serta program dan kebijakan (uraian, indikator kinerja, sasaran, dan target).

RKT adalah dokumen perencanaan kinerja untuk periode satu tahun yang mencakup kebijakan, program, dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh merupakan rincian dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kota Banda Aceh. Dokumen ini merinci kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan, indikator kinerja, serta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditentukan dalam rencana strategis. Setiap target kinerja tahunan dalam RKT ditetapkan untuk semua indikator kinerja pada tingkat sasaran kegiatan, yang menjadi komitmen instansi untuk tercapai dalam satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh untuk periode 2025-2029, yang menjadi langkah penting dalam meningkatkan investasi melalui penanaman modal dan pelayanan publik, khususnya di bidang perizinan dan non-perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh berperan sebagai pengelola Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh. Dengan disusunnya rencana kinerja tahunan ini, diharapkan indikator kinerja dan target yang ditetapkan dapat terukur dan tercapai, sehingga mewujudkan prinsip "Good Governance".

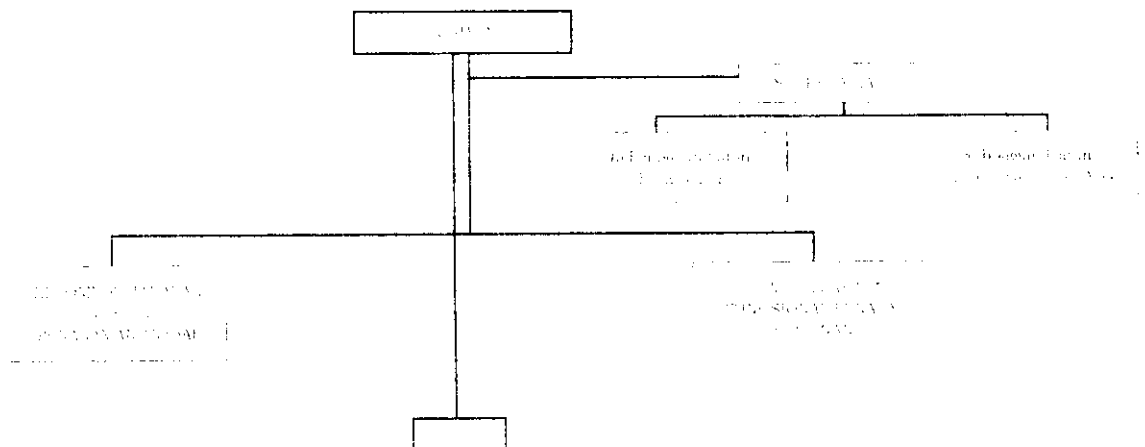
## B. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2025, struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Barang Milik Daerah; dan
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
4. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. UPTD.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2025  
Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2025  
Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh  
2 Pejabat



Legenda:  
— Kepala Dinas dan Sekretaris  
— Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional  
— UPTD

### **C. Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**

Rencana Kinerja Tahunan adalah perencanaan untuk periode satu tahun yang mencakup sasaran/capaian program, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang merupakan rincian dari Rencana Strategis DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029. Dokumen perencanaan ini berisi program dan kegiatan yang berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan arahan terhadap semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Banda Aceh pada tahun 2026.

Rencana Kinerja Tahunan DPMPTSP disusun berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP untuk Tahun Anggaran 2026. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2026 DPMPTSP mengacu pada kondisi pelayanan saat ini, sehingga diharapkan RKT yang dibuat dapat tercapai sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Dengan demikian, pada tahun 2026, DPMPTSP dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sebagaimana diharapkan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bertujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan. RKT juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja. Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rencana Kinerja Tahunan adalah:

1. Sebagai petunjuk dalam menjalankan program kegiatan
2. Menjaga kesinambungan kebijakan
3. Sebagai kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian
4. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja
5. Memanfaatkan fakta-fakta yang ada, baik berupa kendala, hambatan, maupun informasi lainnya
6. Membina dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama
7. Mengintegrasikan sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainnya.

Selain itu, reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGI**

#### **A. Sasaran Strategis**

Rencana Strategis DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh mempunyai tujuan yaitu “Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif”. Serta mempunyai Sasaran “Terwujudnya Layanan Penanaman Modal dan Perizinan yang Mudah, Cepat dan Transparan”. Untuk mencapai Sasaran RPJMD Kota Banda Aceh 2025-2029 strategi yang akan dijalankan oleh DPMPTSP Kota Banda Aceh yaitu “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, adaptif, dan berbasis teknologi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel”. Identifikasi Permasalahan yang terjadi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

#### **B. Tujuan dan Sasaran**

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran SKPD, harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penentuan tujuan dan sasaran perlu memperhatikan kompetensi yang dimiliki oleh seluruh sumber daya dalam organisasi. Setiap sumber daya dalam organisasi harus memiliki kompetensi dengan daya saing yang tinggi untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai bagian dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan menggambarkan kondisi yang diinginkan oleh SKPD dalam lima tahun ke depan.

Rencana strategis mencakup tujuan dan sasaran yang realistis dengan memperhitungkan perkembangan di masa depan. Penetapan tujuan dan sasaran ini akan menjadi landasan dalam penyusunan kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan. Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, indikator sasaran DPMPTSP akan mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Banda Aceh, yaitu:

1. Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota); dan
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

**Tabel 2. 1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Tahun 2025-2029**

	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategis</b>	<b>Kebijakan</b>
Pemerintah Kota Banda Aceh	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, adaptif, dan berbasis teknologi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel	Penyederhanaan prosedur dan inovasi pelayanan publik, melalui:
				1 Membangun sistem layanan pengaduan masyarakat yang mudah dan responsif
				2 Memperkuat koordinasi dan integrasi layanan antar instansi untuk sinergi proses perizinan
				3 Mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional Kemudahan Perizinan di Daerah
4 Melakukan penindakan bagi pelanggaran peraturan daerah				
DPMPTSP Kota Banda Aceh	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Terwujudnya Layanan Penanaman Modal dan Perizinan yang Mudah, Cepat dan Transparan	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, adaptif, dan berbasis teknologi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel	1 Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan PTSP
				2 Menyediakan berbagai kanal pengaduan (offline & online) yang ramah pengguna
				3 Memperkuat koordinasi dan integrasi layanan antar instansi untuk sinergi proses perizinan
				4 Meningkatkan intensitas pengawasan izin berusaha dan non berusaha

### **BAB III**

#### **PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN**

##### **A. Rencana Program Kegiatan**

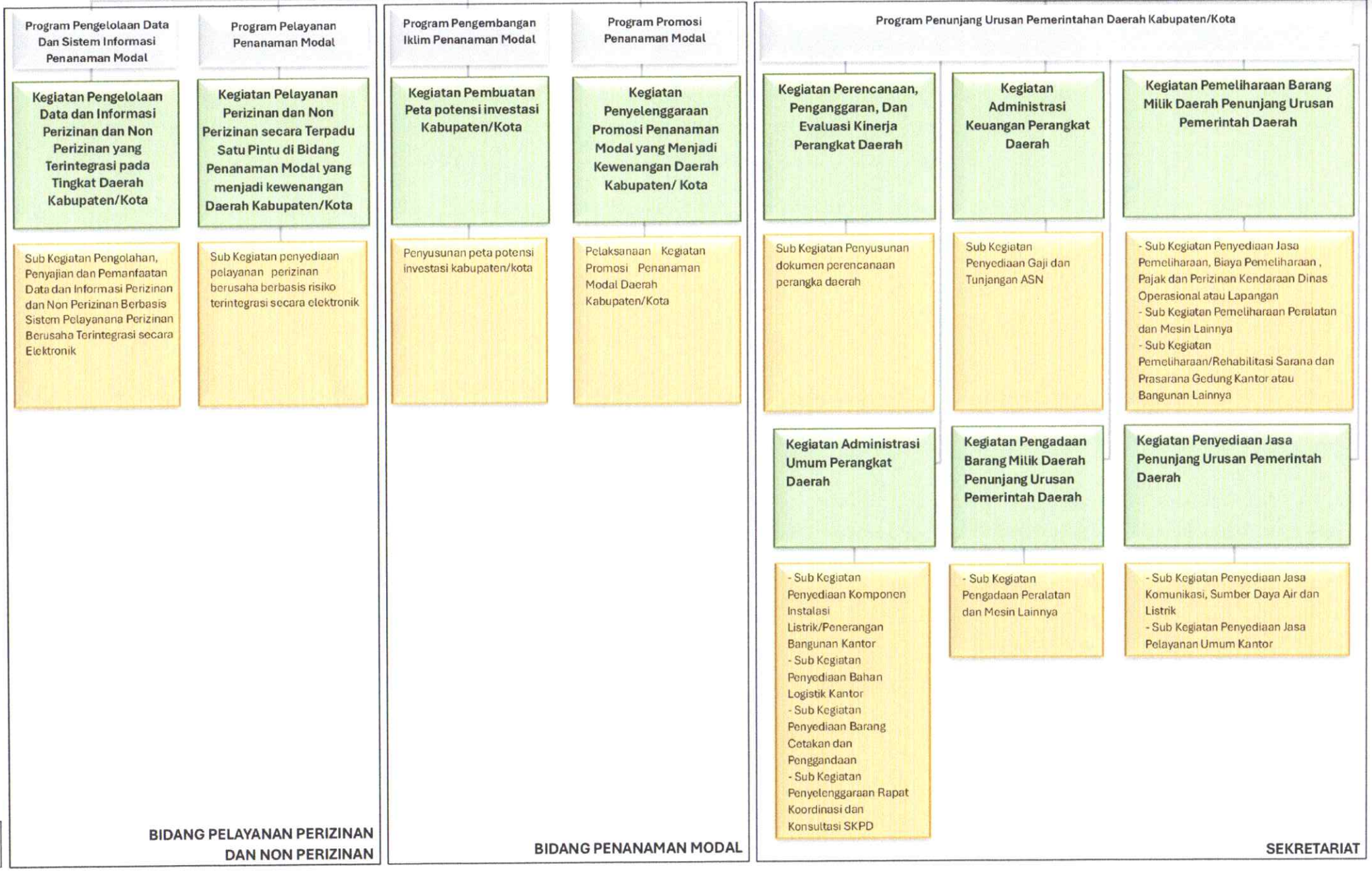
Dalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh (DPMPTSP), menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja menjadi elemen yang sangat penting bagi setiap instansi pemerintah karena berfungsi sebagai komponen utama dalam Sistem (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) SAKIP, yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan instansi dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya.

Indikator kinerja dalam dokumen rencana kinerja tahunan DPMPTSP Kota Banda Aceh mencakup indikator pada tingkat hasil (outcome) dan keluaran (output), yang menggambarkan ukuran keberhasilan secara keseluruhan dari instansi pemerintah, serta keberhasilan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di DPMPTSP Kota Banda Aceh.

Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan Tahun 2026 adalah dokumen yang berisi pernyataan, kesepakatan, atau perjanjian kinerja antara pimpinan dan staf untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh instansi. Dokumen ini mencakup sasaran strategis, indikator kinerja utama, target kinerja, serta anggaran. Penyusunan Penetapan Kinerja 2026 dilakukan dengan merujuk pada Renstra, Renja tahun 2026, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Adapun rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

Tujuan : Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif  
 Sasaran : Terwujudnya Layanan Penanaman Modal dan Perizinan yang Mudah, Cepat dan Transparan

- KEPALA DINAS
- KEPALA BIDANG
- JF AHLI MUDA
- JF/ PELAKSANA
- JF AHLI MUDA
- JF/ PELAKSANA
- PENANGGUNG JAWAB



**Tabel 3. 1**  
**Rencana Kerja, Pendanaan, dan Kelompok Sasaran Tahun 2026**

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu	Kelompok Sasaran
				Volume	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Usuran Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar						
2	18 Usuran Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					11,273,933,454	
2	18 01 Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	10,016,052,054	DPMPTSP
2	18 01 2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	4,894,500	DPMPTSP
2	18 01 2.01 0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	5	Dokumen	4,894,500	DPMPTSP
2	18 01 2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	7,798,317,503	DPMPTSP
2	18 01 2.02 0001 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	12	Bulan/orang	7,798,317,503	DPMPTSP
2	18 01 2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	109,003,951	DPMPTSP
2	18 01 2.06 0001 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	10	Paket	822,700	DPMPTSP
2	18 01 2.06 0002 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	4	Paket	31,882,900	DPMPTSP
2	18 01 2.06 0004 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	6	Paket	2,649,700	DPMPTSP
2	18 01 2.06 0005 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	13	Paket	10,728,800	DPMPTSP
2	18 01 2.06 0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	10	Laporan	62,919,851	DPMPTSP
2	18 01 2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	66,007,100	DPMPTSP
2	18 01 2.07 0006 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	35	Unit	66,007,100	DPMPTSP
2	18 01 2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	1,671,461,000	DPMPTSP
	18 01 2.08 0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	12	Laporan	1,293,080,000	DPMPTSP
2	18 01 2.08 0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	12	Laporan	378,381,000	DPMPTSP
2	18 01 2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	100	%	366,368,000	DPMPTSP

2	18	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	6	Unit	234,126,000	DPMPTSP
2	18	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	63	Unit	28,242,000	DPMPTSP
2	18	01	2.09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	24	Unit	104,000,000	DPMPTSP
2	18	02			<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>Kota Banda Aceh</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>300,000,000</b>	<b>DPMPTSP</b>
2	18	02	2.02		<b>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pembuatan Peta Potensi Penanaman Modal</b>	<b>Kota Banda Aceh</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>300,000,000</b>	<b>DPMPTSP</b>
2	18	02	2.02	0004	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	300,000,000	DPMPTSP
2	18	03			<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Promosi Penanaman Modal</b>	<b>Kota Banda Aceh</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>850,000,000</b>	<b>DPMPTSP</b>
2	18	03	2.01		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal</b>	<b>Kota Banda Aceh</b>	<b>1</b>	<b>Laporan</b>	<b>850,000,000</b>	<b>DPMPTSP</b>
2	18	03	2.01	0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan Promosi Penanaman Modal	Kota Banda Aceh	2	Dokumen	850,000,000	DPMPTSP
2	18	04			<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Kota Banda Aceh</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>7,881,400</b>	<b>DPMPTSP</b>
2	18	04	2.01		<b>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal</b>	<b>Kota Banda Aceh</b>	<b>2</b>	<b>Laporan</b>	<b>7,881,400</b>	<b>DPMPTSP</b>
2	18	04	2.01	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Kota Banda Aceh	2.993	Pelaku Usaha	1,123,700	DPMPTSP
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Kota Banda Aceh	80	Kegiatan Usaha	6,757,700	DPMPTSP
2	18	06			<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Peningkatan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>Kota Banda Aceh</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100,000,000</b>	<b>DPMPTSP</b>
2	18	06	2.01		<b>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Sistem Informasi Perizinan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>	<b>Kota Banda Aceh</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100,000,000</b>	<b>DPMPTSP</b>
2	18	06	2.01	0002	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi Perizinan dan non perizinan Berbasis sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan.	Kota Banda Aceh	1	Dokumen	100,000,000	DPMPTSP

## B. Kinerja Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh juga bertanggung jawab sebagai pengelola Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP merupakan generasi ketiga yang lebih progresif memadukan pelayanan dari Pemerintah Pusat, daerah dan BUMD maupun swasta. MPP juga menjadi fasilitas yang menjadi pusat kegiatan pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan publik secara terintegrasi, mencakup berbagai layanan yang tersedia di Kota Banda Aceh. Berikut ini adalah uraian mengenai instansi dan layanan-layanan yang ada di MPP saat ini.

Untuk ruang Fasilitas Umum terdiri dari Perbankan, Mushalla, Klinik, Layanan Mandiri, Pojok Baca, Pelaminan, Galery Charger, Fasilitas Disabilitas, Ruang Bermain Anak, Tempat Parkir Rooftop, Informasi Center dan Ruang Laktasi. Instansi yang tergabung dalam MPP terdiri dari 31 Instansi yang terdiri dari 7 instansi Pemko dan 22 instansi vertical, dengan regulasi sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
2. Penandatanganan Komitmen Walikota Banda Aceh dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh.

**Tabel 3. 2**  
**Daftar Jenis Layanan MPP Kota Banda Aceh Tahun 2026**

<b>NO</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh	<ul style="list-style-type: none"><li>- Layanan PBG</li><li>- Layanan Sicantik Cloud</li><li>- Helpdesk OSS</li><li>- Layanan Mandiri OSS</li><li>- Layanan Mandiri LKPM</li><li>- Layanan Informasi &amp; Pengaduan</li></ul>
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh	<ul style="list-style-type: none"><li>- Layanan KK, KTP-el &amp; KIA</li><li>- Layanan Akta kelahiran &amp; Akat Kematian</li><li>- Layanan Surat Ket. Pencatatan Sipil</li><li>- Layanan Data Kependudukan</li><li>- Layanan Surat Ket. Pengangkatan Anak</li><li>- Layanan Surat Ket. Pengganti Identitas</li><li>- Layanan Surat Keterangan Pindah (SKP)</li><li>- Layanan Akta Perkawinan &amp; Akta Perceraian</li><li>- Layanan Akta Pengakuan &amp; Pengesahan Anak</li><li>- Layanan Informasi &amp; Pengaduan</li></ul>
3.	Baitul Mal kota Banda Aceh	<ul style="list-style-type: none"><li>- Layanan ZIS</li><li>- Konsultasi Informasi &amp; Konsultasi</li></ul>
4.	Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh	<ul style="list-style-type: none"><li>- Layanan PBB</li><li>- Layanan Pajak Daerah (NPWPD)</li></ul>

		- Layanan Informasi & Pengaduan
5.	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	- Layanan Retribusi Sampah - Layanan Kebersihan - Layanan Penyedotan Tinja - Layanan Pemasangan Perbaikan Lampu Jalan - Layanan Pemangkasan Pohon - Layanan Sewa Alat Berat - Layanan Sewa Taman Sari - Layanan Rekomendasi Lingkungan - Layanan Izin Magang/Penelitian - Layanan sampah medis
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh	- Layanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) - Layanan Informasi & Pengaduan
7.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh	- Layanan Pendaftaran Rencana Tapak/Site Plan Perumahan - Layanan Informasi & Konsultasi
8.	BP Jamsostek	- Pendaftaran Perusahaan Baru - Layanan Pengecekan Tunggalan Iuran - Layanan Informasi & Pengaduan
9.	Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh	- Layanan Perpanjangan SKCK - Layanan Laporan Kehilangan Barang - Layanan Informasi & Pengaduan
10.	Kejaksanaan Negeri Kota Banda Aceh	- Pembayaran Denda - Pembayaran Bukti Tilang - Layanan Konsultasi Hukum Gratis
11.	Samsat, BPKA & Jasa Raharja	- Pembayaran PKB - Perpanjangan STNK Tahunan - Pembayaran SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) - Layanan Informasi & Pengaduan
12.	PT. TASPEN (Persero)	- Layanan Kartu Taspen - Layanan Pengajuan Berkas Klim - Layanan Estimasi Hak Peserta - Otentikasi Peserta Pensiun - Layanan Pendaftaran Enrollment - Informasi Layanan Klim - Layanan Informasi & Pengaduan
13.	PT. PLN (Persero)	- Permohonan Pemasangan Baru - Permohonan Penambahan Daya - Layanan Aplikasi PLN Mobile - Layanan Informasi & Pengaduan
14.	BPJS Kesehatan	- Layanan Pendaftaran Baru - Layanan Pergantian Kartu - Layanan Perubahan Data - Layanan Perubahan Faskes - Layanan Perubahan Status - Layanan Pendaftaran Bayi Baru Lahir - Layanan Kartu Non Aktif - Layanan Perpanjangan Masa Aktif Kartu Anak - Layanan Informasi & Pengaduan
15.	Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh	- Layanan Haji - Layanan Pernikahan - Layanan Pengukuran Arah Kiblat - Layanan Wakaf - Layanan Informasi & Pengaduan
16.	PDAM	- Pembayaran Rekening Air

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasangan Baru</li> <li>- Layanan Informasi &amp; Pengaduan</li> </ul>
17.	Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan Pembuatan Paspor Baru</li> <li>- Layanan Pembuatan Paspor Penggantian</li> <li>- Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk WNI</li> <li>- Layanan Informasi &amp; Pengaduan</li> </ul>
18.	PT. POS Indonesia (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan Pengiriman</li> <li>- Menerima Pembayaran PLN, PDAM, Pulsa, Telkom, Multifinance &amp; OLSHOP</li> <li>- Menerima pembayaran pajak penerimaan negara dan penerimaan daerah</li> <li>- Penjualan Materai 3000 &amp; 6000</li> <li>- Layanan Informasi &amp; Pengaduan</li> </ul>
19.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendaftaran NPWP Secara Online</li> <li>- Layanan Aktivasi EFIN</li> <li>- Layanan Pembuatan Kode e-Billing</li> <li>- Layanan Informasi KSWP</li> <li>- Asistensi Layanan Mandiri</li> <li>- Layanan Informasi dan Konsultasi</li> </ul>
20.	PT. LKMS Mahirah Muamallah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan Pembukaan Rekening</li> <li>- Layanan Penyetoran dan Penarikan</li> <li>- Pengajuan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro</li> <li>- Layanan Informasi &amp; Pengaduan</li> </ul>
21.	PT. Bank Aceh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan Penyetoran dan Penarikan</li> <li>- Menerima Pembayaran Penerimaan Negara &amp; Daerah</li> <li>- Menerima Pembayaran PKB</li> <li>- Menerima Pembayaran Perguruan Tinggi (Unsyiah &amp; UIN)</li> <li>- Menerima Pembayaran &amp; Pembelian Voucher, Pulsa &amp; Wifi</li> </ul>
22.	Pengadilan Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan permohonan perwalian</li> <li>- Layanan permohonan ganti nama</li> <li>- Layanan permohonan perbaikan akta kelahiran</li> <li>- Surat keterangan di pengadilan</li> <li>- Layanan Informasi &amp; Pengaduan</li> </ul>
23.	GAPKAINDO (Asosiasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan SBU (sertifikat Badan Usaha)</li> <li>- Layanan SKA (sertifikat Keahlian)</li> <li>- Layanan SKT (sertifikat Keterampilan)</li> </ul>
24.	BPOM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan Perizinan SKI/SKE</li> <li>- Layanan Pendamping Registrasi Produk Obat dan makanan</li> <li>- Layanan Pengujian Sampel Pihak Ketiga</li> <li>- Layanan Permintaan Informasi dan Pengaduan</li> </ul>
25.	Pegadaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan Booking Gadai</li> <li>- Layanan perpanjang Gadai</li> <li>- Layanan cicil Gadai</li> <li>- Layanan tebus gadai</li> <li>- Layanan pembiayaan usaha</li> <li>- Layanan pembiayaan porsi haji</li> <li>- Layanan cicil kendaraan</li> <li>- Layanan cicil emas</li> <li>- Layanan tabung emas</li> <li>- Layanan Informasi &amp; Pengaduan</li> </ul>
26.	BNN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsultasi Rehabilitasi</li> <li>- Layanan Sosialisasi</li> <li>- Layanan SKHPN Layanan Tes Urine</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Rawat Jalan</li> <li>- Layanan Informasi &amp; Pengaduan</li> </ul>
27.	BEA CUKAI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk perangkat komunikasi yang dibawa dari luar negeri</li> <li>- Layanan pembuatan kode e-Billing</li> <li>- Layanan informasi asistensi ekspor bagi UMKM</li> <li>- Layanan informasi ketentuan barang Kena Cukai</li> <li>- Layanan informasi ketentuan barang kiriman dari luar negeri</li> <li>- Sosialisasi ketentuan barang bawaan penumpang dari luar negeri</li> <li>- Layanan informasi &amp; pengaduan</li> </ul>
28.	BSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan pembukaan rekening</li> <li>- Layanan setor dan tarik tunai</li> </ul>
29.	BSPJI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan pengujian produk</li> <li>- Layanan sertifikasi produk</li> <li>- Layanan pemeriksaan halal</li> <li>- Layanan sertifikasi industry hijau</li> <li>- Layanan verifikasi TKDN</li> <li>- Layanan sertifikasi produk</li> <li>- Layanan Kalibrasi</li> <li>- Layanan pelatihan</li> <li>- Layanan konsultasi</li> </ul>
30.	BTN	
31.	KEMENKUMHAM	- Instansi yang akan hadir

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat program dan kegiatan disusun sebagai pedoman untuk rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh pada tahun 2026. Penyusunan Rencana Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dilakukan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran Tahun 2026 serta sebagai komitmen untuk mencapai target yang ingin diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pemerintah yang efektif, efisien, transparan, bersih, dan akuntabel. Perencanaan kinerja ini adalah penjabaran dari sasaran dan program melalui berbagai kegiatan tahunan, dengan penetapan target kinerja tahunan untuk setiap indikator kinerja kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh berfungsi sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh pada tahun 2026.

Banda Aceh, Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh



**FAISAL M, S.STP**

NIP. 19780101 199810 1 001